

**STRATEGI DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA
DI BIDANG PERTANIAN MELALUI KERANGKA KERJASAMA
SELATAN-SELATAN DI KAWASAN ASIA PASIFIK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun Oleh:

**NANDA PATRICIA
07041281621093**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

STRATEGI DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA DI BIDANG
PERTANIAN MELALUI KERANGKA KERJASAMA SELATAN-
SELATAN DI KAWASAN ASIA PASIFIK

PROPOSAL SKRIPSI

Disusun oleh:

Nanda Patricia
07041281621093

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
dalam ujian akhir Program Sarjana, Juli 2021

Pembimbing I

H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D
NIP. 196504271989031003



Pembimbing II

Sari Mutiara Aisyah S.IP., MA
NIP. 199104092018032001



Disetujui oleh,

Ketua Program Studi,



H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D
NIP. 196504271989031003



HALAMAN PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

**STRATEGI DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA DI BIDANG PERTANIAN
MELALUI KERANGKA KERJASAMA SELATAN-SELATAN
DI KAWASAN ASIA PASIFIK**

SKRIPSI


Telah memperbaiki skripsi sesuai dengan petunjuk dari Tim Penguji dalam Sidang Ujian Skripsi sebagaimana tertulis dalam "Hasil Ujian Skripsi" pada tanggal 27 Juli 2021

TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D
Ketua



Sari Mutiara Aisyah, S.IP., MA
Anggota



Dra. Retno Susilowati, MM
Anggota



Ferdiansyah R, S.IP., MA
Anggota



Indralaya, Juli 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**STRATEGI DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA DI BIDANG PERTANIAN
MELALUI KERANGKA KERJASAMA SELATAN-SELATAN
DI KAWASAN ASIA PASIFIK**

SKRIPSI

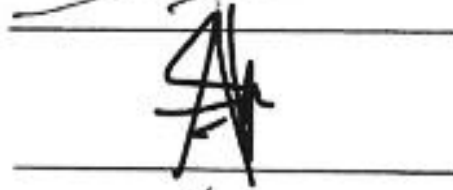
**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 27 Juli 2021
Dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**

TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D
Ketua



Sari Mutiara Aisyah, S.IP., MA
Anggota



Dra. Retno Susilowati, MM
Anggota



Ferdiansyah R, S.IP., MA
Anggota

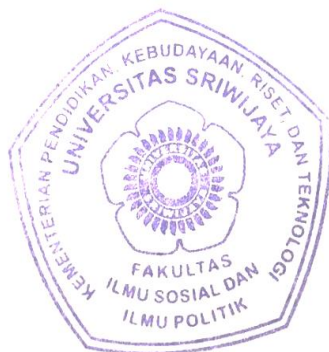


Indralaya, Juli 2021

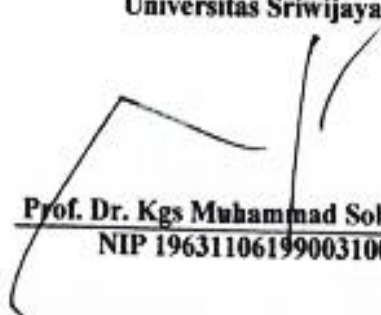
Mengesahkan,

Dekan,

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**



Prof. Dr. Kgs Muhammad Sobri, M.Si
NIP 196311061990031001



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Patricia

NIM : 07041281621093

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia di Bidang Pertanian Melalui Kerangka Kerjasama Selatan-Selatan di Kawasan Asia Pasifik” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 14 Juli, 2021

Yang membuat pernyataan



Nanda Patricia

NIM 07041281621093

**INDONESIAN ECONOMIC DIPLOMACY STRATEGY IN AGRICULTURE
THROUGH THE SOUTH-SOUTH COOPERATION FRAMEWORK
IN THE ASIA PACIFIC REGION**

Oleh:

Nanda Patricia

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Sriwijaya

This study aims to find out and analyze how and what Indonesia's economic diplomacy strategy in the Asia Pacific Region through agriculture that is implemented in the South-South Cooperation scheme. The Asia Pacific region which is the object of this research are countries directly bordering Indonesia or are close to Indonesia which also rely on the agricultural sector as one of the countries' main sources of income, namely Timor Leste, Papua New Guinea, the Republic of Palau, Cambodia, and Fiji. The conceptual frameworks used are the main principles of the Indonesian South-South Cooperation concept adopted from the South-South Cooperation guidelines by the United Nations Office for South-South Cooperation which are the main references in the implementation of South-South Cooperation. The data used by the writer in this study is secondary data obtained from literature studies related to the research theme in the form of books, articles, journals, written media, official documents, published or not directly published archives, to annual reports from organizations or ministries related. The results of the analysis show that the programs in South-South Cooperation implemented or provided by Indonesia for Timor Leste, Papua New Guinea, the Republic of Palau, Cambodia, and Fiji based on the principles of equal partnership (equality), mutual benefit, coordination of initiatives based on evidence and results, and development effectiveness can be Indonesia's strategies to establish or enhance diplomatic relations in the economic field with these countries through agriculture.

Keywords: South-South Cooperation, Economic Diplomacy, Agriculture, Asia Pacific.

Dosen Pembimbing 1,



Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D
NIP. 196504271989031003

Dosen Pembimbing 2,



Sari Mutiara Aisyah, S.IP., MA
NIP. 199104092018032001

Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D
NIP. 196504271989031003

**STRATEGI DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA DI BIDANG PERTANIAN
MELALUI KERANGKA KERJASAMA SELATAN-SELATAN
DI KAWASAN ASIA PASIFIK**

Oleh:

Nanda Patricia

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Universitas Sriwijaya

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana dan apa saja strategi diplomasi ekonomi Indonesia di Kawasan Asia Pasifik melalui bidang pertanian yang diimplementasikan dalam skema Kerjasama Selatan-Selatan. Kawasan Asia Pasifik yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah negara-negara yang berbatasan langsung ataupun dekat dengan Indonesia yang juga mengandalkan sektor pertanian sebagai salah satu sumber utama pendapatan negaranya yaitu Timor Leste, Papua Nugini, Republik Palau, Kamboja, dan Fiji. Kerangka pemikiran yang digunakan adalah prinsip-prinsip utama dari konsep Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia mengadopsi dari pedoman Kerjasama Selatan-Selatan oleh United Nations Office for South-South Cooperation yang menjadi acuan dalam pelaksanaan Kerjasama Selatan-Selatan. Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka yang berkaitan dengan tema penelitian baik berupa buku, artikel, jurnal, media tertulis, dokumen resmi, arsip yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan secara langsung, hingga laporan tahunan dari organisasi atau kementerian terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa program-program dalam Kerjasama Selatan-Selatan yang dilaksanakan atau diberikan oleh Indonesia untuk Timor Leste, Papua Nugini, Republik Palau, Kamboja, dan Fiji berdasarkan prinsip kemitraan sederajat (kesetaraan), keuntungan bersama, koordinasi inisiatif berdasarkan bukti dan hasil, dan efektivitas pembangunan menjadi strategi Indonesia untuk menjalin ataupun meningkatkan hubungan diplomatiknya di bidang ekonomi dengan negara-negara tersebut melalui bidang pertanian.

Kata kunci: Kerjasama Selatan-Selatan, Diplomasi Ekonomi, Pertanian, Asia Pasifik.

Dosen Pembimbing 1,



Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D
NIP. 196504271989031003

Dosen Pembimbing 2,



Sari Mutiara Aisyah, S.IP., MA
NIP. 199104092018032001

Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D
NIP. 196504271989031003

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk semua orang yang telah membantu dan selalu mendukung saya selama masa perkuliahan. *El final es el principio de otra cosa*. Terima kasih untuk semuanya, semoga kebahagiaan selalu menyertai kalian.

1. Untuk kedua orang tua dan adik saya yang saya sayangi
2. Untuk sahabat-sahabat saya yang selalu ada dan memberikan semangat serta dukungan. Terkhusus untuk Rizky Ainayah, Afisyah Mutiara, Ruby Vidya, Agung Prakoso, Sri Hertina, Laras Maharani, Pretty Suza, Annisa R Aldina, Julita Sari, dan Ayu Maudy.
3. Para dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional atas semua ilmu yang telah diberikan. Terkhusus untuk dosen pembimbing akademik yang sekaligus merupakan dosen pembimbing I saya, Bapak H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D, dan Ibu Sari Mutiara Aisyah S.IP., MA selaku dosen pembimbing II yang telah banyak berjasa dalam mendidik dan membimbing saya sejak awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini. Terima kasih banyak atas waktu, tenaga, pikiran, dan semua dukungan yang telah diberikan.
4. Untuk admin jurusan Ilmu Hubungan Internasional, mba Siska dan kak Dimas. Terima kasih banyak atas semua bantuan dan dukungan yang selalu kalian berikan hingga membuat kehidupan perkuliahan saya menjadi lebih mudah untuk dilewati.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah S.W.T, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia di Bidang Pertanian Melalui Kerangka Kerjasama Selatan-Selatan di Kawasan Asia Pasifik”. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagga, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Sc sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya;
3. Dr. H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya dan juga sebagai Dosen Pembimbing Akademik sekaligus dosen pembimbing I skripsi saya yang telah memberikan dukungan selama masa perkuliahan;
4. Dosen pembimbing II skripsi saya Ibu Sari Mutiara Aisyah S.IP., MA yang selalu memberikan dukungan dan membimbing saya dengan sabar dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
5. Semua dosen Ilmu Hubungan Internasional yang telah memberikan ilmunya;
6. Bapak/Ibu pegawai di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, khususnya di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional;
7. Mba Sisca dan Kak Dimas yang telah banyak membantu mengurus keperluan administrasi dan selalu dengan sabar bersedia direpotkan hingga mendengarkan keluh kesah selama masa perkuliahan;
8. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang telah bersedia memberikan bantuan data-data yang diperlukan terkait penulisan skripsi ini;
9. Direktorat Jenderal Informasi Dan Diplomasi Publik , Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Terkhusus kepada Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Bapak Cecep Herawan, Sekretaris Dirjen IDP Bapak Kuncoro Giri Waseso, Bapak Duta Besar Diar Nurbintoro, Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Dirjen IDP, Bapak Jhon Admiral, Bapak Dewa Putu Sastrawan, dan Ibu Hotmaida Hutabarat;
10. Teman-Teman Angkatan 2016 Jurusan Ilmu Hubungan Internasional;

11. Sahabat-sahabat saya, Rizky Ainayah, Afisyah Mutiara, Ruby Vidya, Agung Prakoso, Sri Hertina, Laras Maharani, Pretty Suza, Annisa R Aldina, Julita Sari, dan Ayu Maudy;
12. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Indralaya, 27 Juli 2021

Nanda Patricia
NIM 07041281621093

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	v
Abstract.....	vi
Intisari	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	6
1.4.2 Manfaat Praktis	6
1.5 Kajian Pustaka.....	7
1.6 Landasan Konseptual.....	15
1.6.1 Kerangka Konsep	15
1.7 Alur Pemikiran	22
1.8 Argumen Utama	23
1.9 Metode Penelitian.....	23
1.9.1 Jenis Penelitian	23
1.9.2 Definisi Konsep.....	24
1.9.3 Fokus Penelitian	31
1.9.4 Unit Analisis.....	32
1.9.5 Jenis dan Sumber Data	33
1.9.6 Teknik Pengumpulan.....	33
1.9.7 Teknik Keabsahan Data.....	34
1.9.8 Teknik Analisis Data	35

BAB 2 GAMBARAN UMUM	
2.1. Kerjasama Selatan-Selatan	37
2.2. Sejarah Kerjasama Selatan-Selatan	37
2.3. Struktur Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia	39
2.4. Landasan Hukum Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia	42
2.5. Prinsip Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia	43
2.6. Visi dan Misi Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia.....	44
2.7 Perkembangan Kerjasama Pertanian Indonesia dalam Kerangka Kerjasama Selatan- Selatan	45
2.8 Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan di Kawasan Asia Pasifik	47
BAB 3 PEMBAHASAN	52
3.1 Partnership Among Equality	53
3.2 Mutual benefit partnership	58
3.3 Evidence and result based initiatives.....	63
3.4 Development Effectiveness	66
BAB 4 PENUTUP	74
4.1 Kesimpulan.....	74
4. 2 Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pergeseran atau perkembangan arah kerjasama internasional setelah berakhirnya perang dingin memotivasi negara-negara berkembang untuk tidak terlalu bergantung dengan negara maju dengan mulai mencari alternatif kerjasama internasional untuk memetakan arah perkembangan tatanan ekonomi dan politik mereka demi mencapai kesejahteraan bangsa. Salah satu kerjasama yang terjalin dalam lingkup negara-negara berkembang sebagai salah satu cara alternatif untuk tidak terlalu bergantung dengan donor atau bantuan luar negeri yang terbatas dari negara-negara maju adalah Kerjasama Selatan-Selatan. Perubahan motivasi politik yang terjadi sejak akhir perang dingin mendorong beberapa negara donor dengan berbagai motif kepentingan nasional baik politik maupun ekonomi untuk menyediakan bantuan pembangunan dalam skema Kerjasama Selatan-Selatan. Kerjasama Selatan-Selatan (KSS) adalah kerjasama yang terjalin diantara negara-negara berkembang untuk mencari solusi atas tantangan bersama di bidang pembangunan yang dilatar belakangi oleh sejarah, kondisi geografis, serta tantangan yang sama. Dalam jurnalnya, Kakonge (2014), mengartikan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai "...sebuah proses dimana dua negara atau lebih yang sedang berkembang mengejar tujuan pembangunan individu atau kolektif melalui kerjasama berupa pertukaran pengetahuan, keterampilan, sumberdaya, dan kecakapan teknis."

Kerjasama Selatan-Selatan menjadi wadah bagi negara-negara berkembang untuk melakukan pertukaran sumber daya, teknologi, dan pengetahuan. Dalam laporan PricewaterhouseCooper (PwC), Negara-negara berkembang diramalkan akan terus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi global. Cina bahkan diproyeksikan akan menjadi ekonomi terbesar dunia yang kemudian diikuti oleh India dan Indonesia.

Poin keenam dari sembilan agenda prioritas Presiden Indonesia Joko Widodo yang disebut dengan program Nawa Cita adalah meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Untuk mendukung upaya tersebut tentunya diperlukan kerjasama internasional atau perlunya membangun hubungan baik dengan negara-negara di dunia.

Indonesia memiliki peran yang cukup aktif dalam kerjasama selatan-selatan. Melihat perubahan status Indonesia sebagai “Middle Income Country” atau negara dengan pendapatan menengah sehingga posisi Indonesia saat ini tidak hanya dikenal sebagai negara penerima bantuan tapi juga sebagai negara pendonor. Keanggotaan Indonesia dalam G20 dan perubahan status Indonesia sebagai Middle Income Country membuat Kerjasama Selatan-Selatan ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alat untuk meningkatkan perannya di internasional dan semakin besar peran Indonesia di dunia internasional maka semakin besar juga peluang Indonesia untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Meskipun menyandang gelar sebagai “Middle Income Country”, pada kenyataannya Indonesia belum mampu untuk dapat memberikan bantuan berupa dana yang cukup besar seperti negara-negara lain yakni Cina, Rusia, Brazil atau bahkan India yang meskipun masih sama-sama tergolong negara berkembang namun mampu memberikan bantuan dana hingga ratusan juta dollar AS yang jelas lebih besar dari Indonesia yang hingga tahun 2015 hanya mampu mengalokasikan dana sekitar 40 sampai 50 juta dollar AS (Tim Penyusun Kajian Mandiri Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2015). Tentu saja ini menjadi salah satu tantangan bagi Indonesia dalam menjalankan Kerjasama Selatan-Selatan. Namun, hal ini tidak menjadi penghalang bagi Indonesia. Melihat peluang-peluang positif dari Kerjasama Selatan-Selatan, Indonesia meletakkan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai salah satu fokus pengembangan politik luar negeri dan juga alat peningkatan diplomasi ekonomi.

Dalam Blueprint KSST Indonesia, tercatat bahwa kerjasama internasional yang dilakukan dalam agenda Kerjasama Selatan-Selatan harus sesuai dengan keunggulan dan prioritas Indonesia. Hal ini sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang dilaksanakan untuk memperjuangkan kepentingan nasional di forum internasional. Melihat pernyataan tersebut, keunggulan Indonesia dalam sektor pertanian memberikan peluang Indonesia sebagai negara agraris untuk dapat memainkan peran penting dalam Kerjasama Selatan-Selatan. Keunggulan Indonesia di sektor pertanian dibuktikan oleh penghargaan FAO tahun 1985 untuk Indonesia atas keberhasilannya dalam menangani kerawanan pangan. Hingga saat ini pun, Indonesia masih menjadi negara agraris yang cukup produktif dimana sektor pertanian masih menjadi bagian penting sebagai salah satu penggerak ekonomi negara. Meskipun pertanian Indonesia sempat mengalami pasang surut dan juga penurunan terutama pada tahun 1998 yang diakibatkan oleh krisis ekonomi, namun Indonesia terus berupaya mengembangkan pertaniannya. Salah satunya dengan melakukan revitalisasi pertanian yang didukung dengan Peraturan Menteri Pertanian No.273 Tahun 2007, yang juga merupakan tindak lanjut dari UU No.16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Peternakan dan Kehutanan. Selain itu, keterlibatan Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan di bidang pertanian dengan berbagai programnya seperti pelatihan, study banding, bantuan peralatan dan mesin pertanian serta kerjasama penelitian terkait upaya pengembangan bidang pertanian juga cukup membantu dalam mengembangkan pertanian Indonesia.

Pertanian Indonesia juga terus berkembang hingga saat ini. Pada pertemuan tingkat menteri negara-negara G20 tahun 2019 (2019 G20 Agriculture Minister Meeting) Indonesia juga berhasil memukau negara-negara anggota G20 atas perkembangan dan kemajuan program-program pertaniannya (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2019). Sektor pertanian Indonesia pun terus meningkat sepanjang tahunnya. Berdasarkan data terbaru, grafik kinerja sektor pertanian Indonesia meningkat dengan cukup signifikan di tahun 2020 ini.

Dilansir dari portal Kementerian Pertanian, pertanian menjadi satu-satunya sektor penyumbang ekonomi nasional yang mampu mencapai angka pertumbuhan 2,19 persen. Bahkan untuk periode Januari - Agustus 2020, Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian, Akhmad Musyafak menyatakan kepada CNN Indonesia bahwa kinerja ekspor pertanian mengalami peningkatan cukup signifikan hingga sebesar 8,6 persen (Kementerian Pertanian; CNN Indonesia, 2020). Pengalaman Indonesia dalam sektor pertanian juga rupanya telah diakui oleh internasional melihat banyaknya permintaan atas kerjasama dalam bidang pertanian oleh negara-negara berkembang lainnya. Kerjasama di sektor pertanian banyak diminati oleh negara-negara berkembang karena 75% dari populasi masyarakat negara-negara berkembang menempati daerah pedesaan dan bercocok tanam sehingga sebagian besar perekonomiannya bergantung pada sektor pertanian (Commodities and Trade Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2002).

Dilihat dari lokasi geografisnya, kawasan Asia-Pasifik dianggap sebagai kawasan yang memiliki nilai penting tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga dalam kegiatan dunia. Perkembangan kerja sama internasional di kawasan Asia Pasifik juga terlihat menjanjikan. Untuk itu, Dengan melihat kondisi ekonomi serta persiapan yang matang dalam bidang pertanian, peluang kerja sama Indonesia di kawasan Asia-Pasifik perlu dioptimalkan. Kerjasama yang telah dilakukan Indonesia di Kawasan Asia Pasifik sebelumnya telah memberikan kontribusi yang cukup baik bagi perekonomian Indonesia. Keaktifan Indonesia dalam memberikan bantuan kepada beberapa negara berkembang di Kawasan Asia Pasifik seperti Fiji, Papua Nugini, Timor Leste dan Vanuatu sedikit banyak telah mempengaruhi perekonomian Indonesia. Bantuan berupa pemberian pelatihan peningkatan kapasitas dan juga pemberian alat-alat pertanian telah membantu membuka dan meningkatkan kerjasama perdagangan komoditas pertanian Indonesia dengan negara-negara tersebut (Santikajaya, 2016, Vol 71 (4)). Dengan begitu, peningkatan kerjasama melalui Kerjasama Selatan-Selatan

akan semakin memberikan peluang bagi kerjasama ekonomi Indonesia di Kawasan tersebut. Sebagai kawasan dimana akses pasar belum terbuka secara luas, menjadikan Kawasan Asia Pasifik sebagai pasar non-tradisional dapat berpeluang besar bagi perekonomian Indonesia kedepan. Selain itu, salah satu alasan penulis ingin mengangkat tema penelitian ini adalah karena belum banyaknya penelitian yang membahas tentang Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia di bidang pertanian secara khusus. Dengan prioritas kebijakan pemerintah Indonesia dalam membangun sektor pertanian wilayah perbatasan, tulisan ini akan melihat Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia dengan negara-negara dari kawasan Asia Pasifik yang berbatasan langsung dengan Indonesia yaitu Republik Palau, Fiji, Papua Nugini, Kamboja dan Timor Leste. Selain itu, bagaimana Indonesia menjalankan strategi diplomasi ekonominya di bidang pertanian melalui kerangka Kerjasama Selatan-Selatan di Kawasan Asia Pasifik akan menjadi pembahasan dalam tulisan ini dimana hasil penelitian diharapkan dapat membantu perkembangan diplomasi ekonomi dan memperluas lingkup kerjasama internasional Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis menarik satu rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: “Bagaimana strategi diplomasi ekonomi Indonesia di bidang pertanian melalui kerangka Kerjasama Selatan-Selatan di Kawasan Asia Pasifik?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana dan apa saja strategi diplomasi ekonomi Indonesia di Kawasan Asia Pasifik melalui bidang pertanian yang diimplementasikan dalam skema Kerjasama Selatan-Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pendidikan khususnya di bidang Ilmu Hubungan Internasional.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu upaya pengembangan dan peningkatan strategi diplomasi ekonomi Indonesia
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian yang akan datang.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi penelitian mahasiswa, terutama mahasiswa jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi penulis

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis dalam memahami dan menambah pengetahuan tentang pelaksanaan diplomasi ekonomi suatu negara yang dalam hal ini Indonesia, serta bagaimana implementasi Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia terutama di bidang pertanian dan manfaatnya bagi Indonesia.

- b. Manfaat bagi tenaga pendidik

Penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat bagi tenaga pendidik, terutama tenaga pendidik dengan latar belakang Ilmu Hubungan Internasional melalui tambahan informasi dan pengetahuan yang tertulis dalam penelitian ini yaitu mengenai Kerjasama Selatan-Selatan sebagai salah satu alat diplomasi ekonomi Indonesia, dan bagaimana Indonesia memanfaatkan kelebihanannya di bidang pertanian sebagai salah satu strategi implementasi kerjasama tersebut.

1.5 Kajian Pustaka

Mengingat latar belakang dan histori perjalanan diplomasi Indonesia, serta kerjasama baik bilateral maupun multilateral, tentu sudah banyak penelitian-penelitian terdahulu yang membahas mengenai Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia. Salah satu penelitian terdahulu, oleh tim penulis Center For East Asian Cooperation Studies (CEACoS) yang berjudul “Studi Arah Kebijakan Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan” menjelaskan bahwa Kerjasama Selatan-Selatan akan menjadi peluang baru dalam upaya mengatasi masalah-masalah sosial dan ekonomi seperti pengangguran dan kemiskinan. Dalam penelitian ini juga disebutkan bahwa Kerjasama Selatan-Selatan akan menghadirkan suasana baru dalam lingkup kerjasama pembangunan, serta peningkatan kapasitas di berbagai bidang ((CEACoS), 2010). Dijelaskan juga dalam hasil penelitian tersebut bahwa terdapat beberapa tantangan bagi implementasi Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia. Salah satu tantangannya ialah pentingnya kemampuan Indonesia dalam menggali, memanfaatkan keunggulannya untuk dapat dijadikan strategi implementasi Kerjasama Selatan-Selatan secara optimal. Poin tersebut turut melatar belakangi penulis untuk meneliti di bidang pertanian karena bidang pertanian merupakan salah satu keunggulan yang dimiliki Indonesia.

Penelitian selanjutnya, oleh Tirta Mursitama dengan judul *Seeking a New Format in South-South cooperation and the Benefits for Indonesia*, menyarankan agar pemerintah tidak hanya mengandalkan dana negara ataupun donor dari pihak ketiga, namun peran swasta dan masyarakat sipil juga sebaiknya ditingkatkan agar dapat saling melengkapi dan mendukung proses kerjasama pembangunan. Pemerintah harus mulai memberikan perhatian dan dukungan pada usaha kecil dan menengah, termasuk petani, dan turut mengintegrasikannya ke dalam rantai nilai global. Penelitian ini memberikan tiga rekomendasi baru sebagai upaya peningkatan implementasi Kerjasama Selatan-Selatan yaitu peningkatan keterlibatan sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas epistemik.

Penelitian oleh Hermanto, dalam jurnalnya yang berjudul “Arah Kebijakan Kerja Sama Pertanian Indonesia Di Kawasan Asia Pasifik”, juga menjadi rujukan bagi penulis. Selain karena penelitian ini membahas kerjasama antara Indonesia dan negara-negara Kawasan Asia Pasifik, penelitian ini juga menganalisis bagaimana kesiapan pertanian Indonesia untuk dapat terlibat dalam kerjasama internasional dengan berdasarkan kepada teori-teori kerja sama internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan liberal institusional dalam melihat dan membahas pentingnya kerjasama antar negara. Penelitian ini menghasilkan delapan rekomendasi upaya untuk perkembangan pertanian Indonesia dan tiga rekomendasi upaya peningkatan kerjasama di Kawasan Asia Pasifik.

John O. Kakonge, dalam salah satu jurnalnya, *The Evolution of South-South Cooperation: A Personal Reflection* menyatakan negara-negara berkembang dengan ekonomi lebih besar semakin melihat peluang dalam Kerjasama Selatan-Selatan. Negara-negara tersebut semakin serius melihat kerjasama ini sebagai bagian dari strategi kebijakan luar negeri melalui hubungan dengan negara-negara yang memiliki ekonomi lebih kecil di bagian selatan. Menurut Kakonge, Kerjasama Selatan-Selatan ini akan semakin berhasil jika difokuskan pada kerjasama Teknik dan pertukaran pengetahuan dibandingkan dengan cara kerjasama tradisional yang hanya berfokus pada dukungan anggaran oleh negara donor. Kakonge menggambarkan keuntungan-keuntungan dari Kerjasama Selatan-Selatan dalam bentuk dukungan negara-negara berkembang yang terlibat dikarenakan adanya rasa kepemilikan atas aktivitas atau program yang terjalin di antara mereka. Kekompakan negara-negara selatan ini dibuktikan oleh Kakonge melalui beberapa kasus, dimana salah satunya adalah ketika Afrika Barat melakukan kampanye melawan masalah kebutaan sungai. Kampanye yang berlangsung cukup lama sejak 1974 hingga 2002 ini pada akhirnya berhasil karena dukungan dari negara-negara selatan yang dengan sukarela berbagi informasi, pengetahuan, serta memberikan fasilitas penelitian. Dalam

penelitiannya Kakonge menyatakan bahwa kerjasama tidak harus selalu berupa bantuan dana melalui donor, tetapi juga bisa melalui bentuk kerjasama teknik dan transfer pengetahuan. Bentuk kerjasama teknik dan transfer pengetahuan inilah yang akan penulis teliti lebih lanjut dalam penelitian ini.

Penelitian rujukan selanjutnya adalah “Peran Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular” oleh Bulbul Abdurachman dan Bagus Mi’raz Prakoso yang menceritakan awal mula perjalanan Kerjasama Selatan-Selatan di Indonesia, dimulai dari Konferensi Asia Afrika (KAA), keanggotaannya dalam G20, hingga perubahan status Indonesia sebagai “Middle Income Country” atau negara dengan pendapatan menengah. Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis untuk melihat lebih jauh bagaimana histori perjalanan Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia selama ini. Penelitian ini juga membahas bagaimana pengaruh keanggotaan Indonesia di G20 dalam mengimplementasikan Kerjasama Selatan-Selatan. Namun, penelitian ini menyebutkan bahwa Indonesia masih dianggap sebagai “potential global buyer”, terlebih mengingat fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat setelah China, Amerika Serikat dan India. (Abdurachman & Prakoso, Peran Indonesia dalam Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular, 2017). Terkait pernyataan tersebut, penulis ingin meneliti potensi Indonesia yang kenyataannya sudah mampu menjadi “provider” dalam Kerjasama Selatan-Selatan, juga akan mampu mengubah posisinya tidak hanya sebagai “buyer” atau pasar bagi negara-negara lain, tetapi Indonesia juga memiliki cukup potensi untuk menciptakan pasarnya dengan melihat peluang untuk dapat membuka pasar-pasar baru atau pasar nontradisional di negara-negara selatan, terutama di Kawasan Asia Afrika.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Judul Penelitian	Hasil	Perbandingan
1	<p>Studi Arah Kebijakan Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan</p> <p>Oleh: Center For East Asian Cooperation Studies (CEACoS)</p>	<p>Penelitian ini menjelaskan tentang arah Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia termasuk strategi, peluang, dan tantangan yang dapat dihadapi oleh Indonesia. Penelitian ini juga membahas tentang dinamika KSS dalam sudut pandang internasional, serta pelaksanaan KSS di beberapa negara.</p>	<p>Penelitian ini membahas strategi Kerjasama Selatan-Selatan secara umum dengan berfokus kepada kebijakan internasional, sementara penulis ingin membahas mengenai strategi diplomasi ekonomi Indonesia melalui Kerjasama Selatan-Selatan.</p>
2	<p>Seeking A New Format in South-South Cooperation and The Benefits for Indonesia</p> <p>Oleh : Tirta Mursitama</p>	<p>Jurnal ini menceritakan tentang sejarah perjalanan Kerjasama Selatan-Selatan dalam lingkup global dan nasional. Dalam jurnal ini dijelaskan mengenai kebijakan-kebijakan dan implementasi Kerjasama Selatan-Selatan di Indonesia serta keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh Indonesia.</p>	<p>Jurnal ini lebih membahas tentang sejarah perjalanan Kerjasama Selatan-Selatan baik dalam lingkup nasional dan global dengan menganalisis kesenjangan antara kebijakan dan implementasinya serta manfaat-manfaat yang diperoleh Indonesia secara keseluruhan, sedangkan penulis akan membahas</p>

			<p>bagaimana Kerjasama Selatan-Selatan dapat digunakan sebagai alat diplomasi ekonomi Indonesia.</p>
3	<p>Arah Kebijakan Kerja Sama Pertanian Indonesia Di Kawasan Asia Pasifik</p> <p>Oleh: Hermanto, dalam Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol. 36 No. 1, Juli 2018: 63-79.</p> <p>Diterbitkan oleh : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Kementerian Pertanian Indonesia.</p>	<p>Jurnal ini membicarakan tentang bagaimana kerjasama-kerjasama pertanian Indonesia yang terjalin dengan negara-negara di Kawasan Asia Pasifik telah memberikan banyak kontribusi positif terhadap perekonomian nasional. Jurnal ini juga menerangkan besarnya peluang Indonesia untuk membuka pasar baru di Kawasan Asia Pasifik terutama pasar bagi produk-produk pertanian Indonesia (Hermanto, 2018).</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang Kerjasama Pertanian sebagai salah satu bentuk kerjasama internasional yang dilakukan oleh Indonesia. Terkait hal ini, penulis ingin menjelaskan bahwa kerjasama pertanian yang terjalin antara Indonesia dan negara-negara Kawasan Asia Pasifik juga merupakan bagian dari Kerjasama Teknik dan pengembangan kapasitas serta transfer pengetahuan dimana bentuk kerjasama tersebut termasuk dalam skema Kerjasama Selatan-Selatan. Penelitian tersebut juga menyebutkan peluang</p>

			Indonesia untuk membuka pasar di Kawasan Asia Pasifik, tetapi tidak menjelaskan secara terperinci strategi untuk mencapai hal tersebut dan strategi-strategi itulah yang akan penulis teliti lebih lanjut.
4	<p>The Evolution of South-South Cooperation: A Personal Reflection</p> <p>Oleh: John O. Kakonge, dalam jurnal Development, Inequality And Poverty Journals Vol. 5 No. 3, Juli 2014, 1-7.</p> <p>Diterbitkan oleh : Global Policy</p>	<p>Jurnal ini merupakan jurnal yang menjelaskan tentang Kerjasama Selatan-Selatan secara umum. Poin-Poin yang dibahas dalam jurnal yang ditulis secara deskriptif ini adalah tantangan-tantangan yang kemungkinan dihadapi serta keuntungan dari implementasi Kerjasama Selatan-Selatan yang baik bagi negara-negara berkembang (Kakonge, The Evolution of South-South Cooperation: A Personal Reflection, 2014)</p>	<p>Dalam penelitian ini disebutkan bahwa pada masa sekarang ini, melalui Kerjasama Selatan-Selatan sebuah negara tidak harus bergantung kepada bantuan dana donor dari negara lain. Negara-negara berkembang juga bisa memanfaatkan bantuan-bantuan di bidang teknis dan transfer pengetahuan. Namun sayangnya, penelitian tersebut tidak menjelaskan secara rinci bantuan seperti apa yang dapat dikatakan</p>

			<p>sebagai bantuan teknik dan seperti apa proses transfer teknologi yang dimaksud, sehingga penulis ingin mencoba membahas lebih lanjut mengenai hal tersebut.</p>
5	<p>Peran Indonesia dalam Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular</p> <p>Oleh: Bulbul Abdurachman & Bagus Mi'raz Prakoso dalam jurnal Transborders: International Relations Journals Vol. 1 No. 1, Desember 2017, 20-34.</p> <p>Diterbitkan oleh: Universitas Pasundan</p>	<p>Jurnal ini berisikan tentang bagaimana peran Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan yang dipengaruhi oleh keanggotaannya dalam G20 dan juga perubahan status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah (Middle Income Country). (Abdurachman & Prakoso, Peran Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular, 2017)</p>	<p>Jurnal ini lebih menjelaskan bagaimana peran Indonesia dalam mengimplementasikan Kerjasama Selatan-Selatan berdasarkan histori keanggotaan G20. Namun, dalam penelitian ini Indonesia diposisikan sebagai negara “Global Buyer” dimana Indonesia hanya dilihat sebagai pasar dan negara pembeli. Dalam hal ini, penulis tertarik untuk meneliti kemampuan Indonesia untuk tidak selalu dianggap sebagai negara pembeli saja, tetapi</p>

			Indonesia juga mampu untuk membuka dan mengembangkan pasarnya sendiri di negara-negara berkembang terkhususnya negara-negara di Kawasan Asia Pasifik.
6	<p><i>South-South Cooperation - A Theoretical and Institutional Framework</i></p> <p>Oleh: TSachin Chaturvedi dan Milindo Chakrabarti dalam proyek penelitian di bawah inisiatif <i>South-South Global Thinkers- the Global Coalition of Think Tank Networks for SSC</i></p>	<p>Penelitian ini juga menggambarkan bagaimana kerjasama selatan-selatan sebagai suatu bentuk kerjasama yang kompleks. Terdapat berbagai macam pendekatan yang berbeda-beda terkait definisi kerjasama selatan-selatan. Perbedaan tersebut pada akhirnya mengarahkan kerjasama selatan-selatan untuk berjalan mengikuti prinsip-prinsip dasar kerjasama selatan-selatan sebagaimana tertuang dalam kerangka pedoman operasional dukungan PBB untuk Kerjasama Selatan-Selatan. Dalam penelitian ini juga menyebutkan bagaimana kerjasama selatan-selatan terlihat mengejar proses pembangunan</p>	<p>Penelitian ini turut menjadi rujukan penulis dalam menentukan landasan konsep karena terdapat beberapa kesamaan dalam poin-poin prinsip pelaksanaan kerjasama selatan-selatan dengan kerangka pedoman pelaksanaan kerjasama selatan-selatan yang dikeluarkan oleh <i>United Nations Office for South-South Cooperation (UNOSSC)</i>. Adapun kesamaan prinsip pedoman pelaksanaan yang dimaksud adalah <i>Demand Driven,</i></p>

		bersama yang melibatkan negara-negara selatan. Prinsip-prinsip dalam kerjasama ini juga menghindari terjadinya pelanggaran kedaulatan, tercapainya keuntungan bersama dan terciptanya pembangunan yang sehat dan berkelanjutan (Chaturvedi & Chakrabarti, 2019)	<i>Respect for national sovereignty, Mutual benefit dan Development effectiveness.</i>
--	--	---	--

1.6 Landasan Konseptual

1.6.1 Kerangka Konsep

a. Kerjasama Internasional

Studi tentang kerjasama internasional telah berkembang selama beberapa dekade terakhir sebagai landasan atau acuan dalam penelitian hubungan internasional. Konsep kerjasama internasional secara khusus telah digunakan dalam berbagai penelitian tentang hubungan internasional yang memperdebatkan bagaimana kerjasama muncul dan bertahan dalam sistem internasional yang anarkis. Konsep kerjasama internasional itu sendiri mulai dikenal sejak awal 1980-an sebagai perilaku terkoordinasi dari aktor-aktor independen yang menguntungkan semua pihak (Taylor, 1987).

Secara umum, kerjasama internasional adalah suatu interaksi antar orang atau kelompok yang mewakili berbagai negara dalam mengejar tujuan atau kepentingan bersama. Kerjasama tersebut dapat bergerak di berbagai bidang seperti kerja sama di bidang politik, sosial, pertahanan keamanan, kebudayaan, dan ekonomi. Axelrod dan Keohane, mendefinisikan kerjasama sebagai suatu fenomena yang terjadi ketika aktor menyesuaikan perilaku mereka dengan preferensi aktual atau yang diantisipasi dari orang lain untuk mencapai

suatu tujuan melalui proses koordinasi kebijakan (Axelrod & Keohane, 1985). Dalam tulisannya, Keohane juga menggambarkan dua elemen penting dari kerjasama internasional (Axelrod & Keohane, 1985), yaitu:

1. Perilaku setiap aktor dalam kerjasama internasional diarahkan kepada beberapa tujuan atau keinginan bersama
 2. Kerjasama tersebut dipastikan akan memberikan keuntungan kepada masing-masing aktor
- Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, terkait bagaimana kerjasama internasional akan terjadi adalah jika memenuhi setidaknya dua kondisi yang terkait yaitu:

1. Para aktor harus memiliki kepentingan bersama dan masing-masing harus mendapatkan keuntungan dari kerja sama mereka.
2. Adanya kondisi yang memungkinkan untuk menjalankan kerjasama yang saling membangun dan bersifat substansial

Berdasarkan pada gagasan-gagasan terkait kerjasama antar negara untuk tujuan dan kepentingan bersama, juga dapat dilihat bahwa bentuk-bentuk diplomasi ideal akan terjalin dengan adanya pembentukan rezim dan kerjasama internasional yang relevan.

b. Diplomasi Ekonomi

Pada era globalisasi saat ini, kerjasama ekonomi merupakan salah satu bidang yang semakin mendapatkan perhatian khusus dalam hubungan kerjasama antarnegara. Perubahan status isu-isu ekonomi yang sudah tidak lagi dianggap sebagai *low politics* membuat diplomasi ekonomi semakin menjadi strategi penting dalam agenda politik internasional. Terdapat beberapa definisi diplomasi ekonomi dimana definisi tersebut terus berubah seiring dengan perubahan arah pergerakan ekonomi dan politik internasional. Meskipun demikian, Profesor Bayne dan Woolcock (Bayne & Woolcock, 2017) menggambarkan diplomasi ekonomi sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan oleh suatu negara terkait bagaimana negara tersebut melakukan hubungan ekonomi dengan negara-negara lain termasuk dimulai dengan bagaimana

negara mengambil sebuah keputusan terkait kepentingan ekonominya di tingkat nasional yang kemudian akan dinegosiasikan atau dipromosikan di lingkup global. Meskipun negara terkesan menjadi pusat dalam pengertian ini, namun aktor-aktor non-negara seperti perusahaan transnasional, LSM, serikat pekerja, hingga pelaku bisnis juga memiliki peran sebagaimana mereka memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Perlu diingat bahwa perkembangan ekonomi global juga dapat memengaruhi baik bentuk, metode, maupun prinsip-prinsip diplomasi ekonomi suatu negara. Tidak hanya itu, Diplomasi ekonomi pada akhirnya juga akan mempengaruhi formulasi kebijakan ekonomi suatu negara terkait proses produksi, pertukaran barang dan jasa, hingga sumber daya lainnya yang akan digunakan dalam pola hubungan internasional sebagaimana disebutkan oleh G.R Berridge dan Alan James terkait pengertian diplomasi ekonomi dalam pandangan mereka;

“Economic diplomacy is concerned with economic policy issues, e.g work of delegations at standard setting organizations such as WTO and BIS. Economic diplomats also monitor and report on economic policies in foreign countries and advise the home government on how to best influence them. Economic diplomacy employs economic resources, either as rewards or sanctions, in pursuit of a particular foreign policy objective. This is sometimes called economy statecraft” (Berridge & James, 2003).

Beberapa aspek penting dari diplomasi ekonomi adalah upaya untuk meningkatkan kerjasama perdagangan, investasi dan pariwisata dan salah satu ciri khas dari diplomasi ekonomi adalah kepekaannya terhadap perkembangan pasar. Poin ini dapat dilihat dari faktor-faktor yang membentuk atau mempengaruhi diplomasi ekonomi suatu negara secara umum (Woolcock, 2017), yaitu:

1. Faktor Sistem Internasional

a. Kekuatan Ekonomi Relatif

Secara klasik, beberapa negara masih memiliki kepercayaan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh suatu negara dapat menentukan hasil negosiasi ekonomi. Meskipun begitu, pada masa globalisasi seperti sekarang ini, kekuasaan atau kekuatan saja tidak akan cukup.

b. Organisasi dan rezim internasional

Organisasi-organisasi maupun rezim internasional saat ini mulai mencoba memfasilitasi negara-negara yang memiliki masalah ekonomi untuk dapat menyelesaikannya secara kooperatif.

c. Pasar Global

Berbeda dengan bentuk-bentuk diplomasi lain, pasar global merupakan bagian integral dari proses negosiasi dalam diplomasi ekonomi.

2. Faktor Domestik

a. Proses Pencapaian Kepentingan dan Tawar Menawar

Perbedaan kepentingan masing-masing negara yang dipengaruhi oleh masalah ekonomi dan berbagai kelompok masyarakat domestik yang juga bisa berperan sebagai agen diplomasi akan sangat menentukan sikap nasional terhadap upaya diplomasi ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah masing-masing negara dapat melakukan tawar-menawar satu sama lain untuk mencapai kesepakatan bersama.

b. Lembaga

Dalam praktiknya, pemerintah jarang bertindak sebagai satu-satunya agen diplomasi ekonomi. Pemerintah biasanya akan melibatkan atau bekerja sama dengan beberapa lembaga terkait atau yang bisa disebut sebagai aktor non-negara dalam menjalankan misi diplomasi dan proses negosiasi internasional.

Di Indonesia sendiri, diplomasi ekonomi semakin diperhitungkan dan menjadi perhatian khusus. Di tengah persaingan global yang semakin ketat dengan melihat faktor ekonomi relatif, pemerintah Indonesia tentu harus memikirkan secara matang arah dan strategi diplomasi ekonomi Indonesia. Kerjasama Selatan-Selatan sebagai wadah kerjasama bagi negara-negara pembangunan, dapat memfasilitasi diplomasi ekonomi Indonesia ke negara-negara di bagian selatan terutama di Kawasan Asia Pasifik mengingat posisi Indonesia di pasar global, akan lebih baik jika Indonesia menjalin kerjasama di Kawasan tersebut yang pada akhirnya dapat mendukung upaya Indonesia untuk membuka pasar-pasar non-tradisional baru. Jika dilihat dari faktor-faktor domestik, diplomasi ekonomi Indonesia juga didukung dengan Rencana Strategi Kementerian Luar Negeri tahun 2015 – 2019 yang mengarah kepada upaya pencapaian kepentingan ekonomi nasional melalui peningkatan kerjasama pembangunan baik di bidang kesehatan, pendidikan, pertanian, energi, hingga lingkungan hidup. Dengan begitu, Indonesia dapat menawarkan berbagai bentuk kerjasama kepada negara lain untuk kemudian dapat mencapai kesepakatan bersama dengan didukung oleh Lembaga-lembaga terkait maupun agen-agen diplomasinya.

c. Kerjasama Selatan-Selatan

Menurut Kakonge, Kerjasama Selatan-Selatan (KSS) adalah kerjasama yang terjalin diantara negara-negara berkembang untuk mencari solusi atas tantangan bersama di bidang pembangunan yang dilatar belakangi oleh sejarah, kondisi geografis, serta tantangan yang sama (Kakonge, Global Policy, 2014). Kerjasama Selatan-Selatan bergerak di bidang pembangunan, hingga pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan sumberdaya baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun teknis yang disesuaikan pada kebutuhan masing-masing dari negara penerima bantuan. Kerjasama ini pada masa-masa awal terbentuknya unit SSC (South-South Cooperation) oleh PBB dimulai untuk mempromosikan perdagangan antar negara-negara anggotanya dan tidak dapat dipungkiri bahwa memang, salah satu tujuan utama KSS adalah

untuk memperkuat dan meningkatkan hubungan ekonomi (*United Nations Department of Economic and Social Affairs*, 2019). Dominasi negara-negara maju dalam perdagangan global, terutama dengan munculnya kekuatan baru seperti Cina, India, Rusia, dan Brazil, semakin mempersulit persaingan produk-produk nasional Indonesia dalam perdagangan global. Belum lagi dengan arus globalisasi yang terus meningkat semakin memberikan tantangan bagi pelaksanaan diplomasi Indonesia. Oleh karena itu, selain untuk meningkatkan hubungan atau menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara berkembang lainnya, Indonesia melihat peluang bagaimana Kerjasama Selatan-Selatan yang dulunya dikenal dengan istilah kerjasama teknik ini dapat menjadi wadah bagi Indonesia untuk meningkatkan strategi diplomasi ekonominya. Kerja sama Selatan-Selatan bersifat sangat kompleks dan tidak ada satu definisi tunggal mengenai konsep kerjasama tersebut. Namun, pelaksanaan Kerjasama Selatan-Selatan, selalu mengacu kepada prinsip-prinsip yang tercantum dalam Kerangka Pedoman Operasional Kerjasama Selatan-Selatan (*Framework of Operational Guidelines on United Nations Support to South-South Cooperation*) yang dikeluarkan oleh PBB / *United Nations Office for South-South Cooperation* (*United Nations Office for South-South Cooperation*, 2016). Oleh karena itu, pedoman (*guideline*) inilah yang akan penulis olah untuk meneliti strategi diplomasi ekonomi Indonesia di bidang pertanian dalam konsep kerjasama selatan-selatan. Terdapat dua prinsip dalam Kerangka Pedoman Operasional Kerjasama Selatan-Selatan yaitu normatif (*normative*) dan operasional (*operational*). Prinsip-prinsip normatif pelaksanaan kerjasama ini adalah:

1. Menghormati kedaulatan dan kepemilikan nasional (*respect for national sovereignty and ownership*)
2. Kemitraan yang sederajat (*mutual partnership*)
3. Tidak bersyarat (*non-conditionality*)
4. Tidak ada campur tangan untuk urusan dalam negeri (*Non-interference in domestic affairs*)

5. Keuntungan bersama (*mutual benefit*)

Selain kelima prinsip normatif tersebut, prinsip-prinsip operasional Kerjasama Selatan-Selatan adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas dan transparansi bersama (*Mutual accountability and transparency*)
2. Efektifitas pembangunan (*Development effectiveness*)
3. Koordinasi inisiatif berdasarkan kepada bukti dan hasil (*Coordination of evidence- and results-based initiatives*)
4. Pendekatan multi-pemangku kepentingan (*Multi-stakeholder approach*).

Suatu negara harus mempunyai kekuatan atau daya tarik yang dapat menarik negara lain sehingga negara tersebut dapat secara tidak langsung mempromosikan kepentingan nasionalnya melalui strategi diplomasi yang tepat yang kemudian Kerangka Kerjasama Selatan-Selatan diharapkan dapat menjadi wadah bagi pelaksanaan strategi diplomasi tersebut.

Untuk mendukung strategi tersebut, Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia menjadikan UU No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005- 2025 sebagai salah satu acuan pelaksanaannya dimana di dalam RPJPN tersebut disebutkan upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan perannya di dunia internasional. Karena itu, untuk menganalisa lebih lanjut, penulis memilih empat prinsip utama dari kedelapan prinsip pelaksanaan Kerjasama Selatan-Selatan tersebut untuk melihat strategi diplomasi ekonomi Indonesia di bidang pertanian dalam Kerangka Kerjasama Selatan-Selatan. Penulis memilih empat prinsip yang dianggap relevan disesuaikan dengan RPJPN Indonesia yaitu:

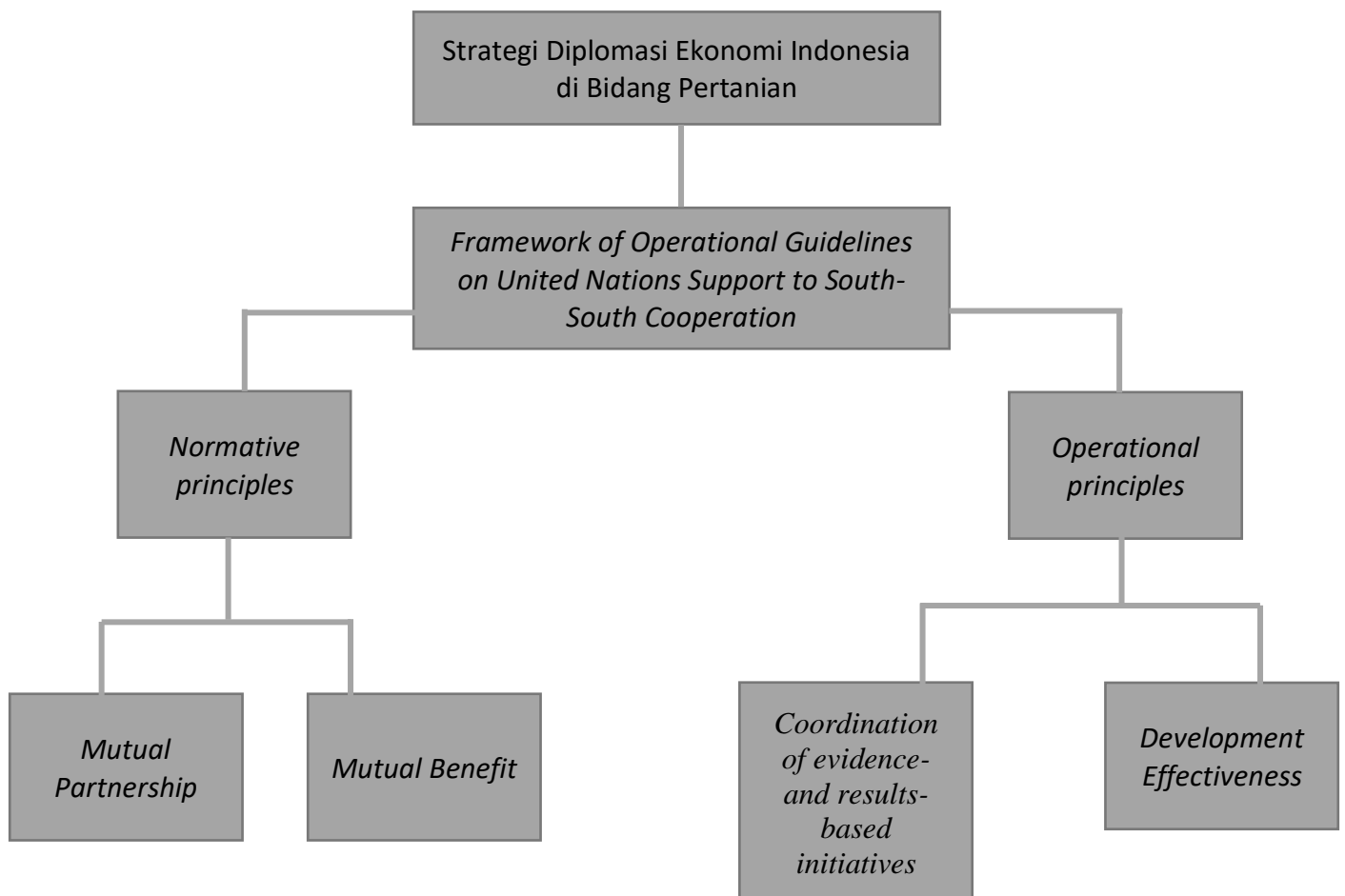
1. Kemitraan yang sederajat (*mutual partnership*)
2. Koordinasi inisiatif berdasarkan kepada bukti dan hasil (*Coordination of evidence- and results-based initiatives*)
3. Keuntungan bersama (*mutual benefit*)

4. Efektifitas pembangunan (*Development effectiveness*)

1.7 Alur Pemikiran

Diplomasi ekonomi merupakan instrumen yang cukup penting bagi sebuah negara. Kemampuan negara dalam melaksanakan diplomasi ekonominya akan mempengaruhi pertumbuhan perekonomian nasional. Perkembangan arah ekonomi politik global membawa sedikit banyak perubahan dalam tatanan kehidupan bangsa dan negara termasuk proses diplomasi yang semakin kompleks. Berbagai macam lembaga kerjasama ekonomi dapat menjadi wadah bagi Indonesia untuk melakukan praktik diplomasi ekonominya.

Kerjasama Selatan-Selatan dapat menjadi wadah bagi diplomasi ekonomi Indonesia. Dengan berdasarkan kepada prinsip-prinsip pelaksanaan Kerjasama Selatan-Selatan, penulis akan menganalisa strategi diplomasi ekonomi Indonesia di bidang pertanian dalam Kerangka Kerjasama Selatan-Selatan menggunakan diagram alur pemikiran di bawah ini:



Sumber: hasil konstruksi penulis berdasarkan *UNOSSC Framework of Operational Guidelines on United Nations Support to South-South Cooperation*

1.8 Argumen Utama

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penentuan rumusan masalah, kerangka teori, serta alur pemikiran yang digambarkan, peneliti memiliki argumen utama bahwa dengan melihat arah kebijakan, visi dan misi, tujuan, serta prinsip pelaksanaannya, strategi diplomasi ekonomi Indonesia (pertanian) dalam Kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dapat dilihat melalui beberapa poin berikut:

1. Menjalinkan kerjasama dengan negara-negara yang memiliki latar belakang maupun tantangan yang sama
2. Menjalinkan kerjasama berdasarkan bukti dan hasil melalui pertukaran pengalaman dan pengetahuan di bidang yang diungguli
3. Menjalinkan kerjasama berdasarkan kebutuhan dan kemampuan sehingga kerjasama memiliki peluang keberlanjutan yang tinggi
4. Menjalinkan kerjasama atas dasar solidaritas untuk membangun kemandirian bersama (mutual benefit partnership).

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Suryana dalam buku ajar perkuliahan Metodologi Penelitian (Suryana, 2010), penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan secara sistematis, ²³actual, dan akurat mengenai suatu fenomena yang diteliti. Penelitian deskriptif dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara melakukan studi kasus yang kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang sudah ada sebagai landasan dalam menarik suatu

kesimpulan baru, untuk pada akhirnya diinterpretasikan secara kualitatif atau melalui penggambaran dalam bentuk kata-kata sesuai dengan fakta yang ada.

1.9.2 Definisi Konsep

Beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan dalam rangkaian definisi konsep sebagai berikut:

a. Diplomasi Ekonomi

Diplomasi ekonomi adalah salah satu cara untuk membangun dan meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi suatu negara dengan negara-negara lain dalam lingkup internasional. Diplomasi ekonomi juga dilakukan sebagai salah satu alat untuk membuka pasar dalam kegiatan ekonomi lintas batas seperti impor dan ekspor. Dalam pengertian yang lebih luas, diplomasi ekonomi juga termasuk kerjasama-kerjasama internasional untuk membantu suatu negara meningkatkan perekonomiannya. Dalam

tulisannya, *Economic Diplomacy: The Experience of Developing Countries*, Rana (Rana, 2007) menjelaskan bahwa diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara setidaknya melewati tahap-tahap berikut:

1. Adanya promosi perdagangan
2. Networking yang mengarah pada upaya penjangkauan kemitraan ke berbagai aktor, baik negara maupun non-negara, sebagai kontributor diplomasi ekonomi
3. Promosi negara, dimana citra dan reputasi negara yang positif dapat mempengaruhi atau bahkan memfasilitasi proses diplomasi ekonomi
4. Penetapan final regulation sebagai dasar kesepakatan atas kerjasama yang terjalin

Konsep diplomasi ekonomi digunakan dalam penelitian ini karena peneliti akan menjelaskan mengenai kerjasama-kerjasama pertanian yang dilakukan oleh Indonesia dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan sebagai strategi diplomasi ekonomi Indonesia di Kawasan Asia Pasifik. Diplomasi ekonomi Indonesia yang dilakukan melalui Kerjasama Selatan-Selatan

ini akan membantu membangun hubungan politik yang baik yang juga menumbuhkan kepercayaan untuk dapat memfasilitasi perdagangan hingga investasi yang saling menguntungkan.

b. Kerjasama Internasional

Ketika suatu negara melakukan diplomasi, kegiatan tersebut menggambarkan upaya negara untuk menjalin kerjasama dengan negara-negara lain yang disebut dengan kerjasama internasional. Menurut Milner (Milner, 2011), kerjasama internasional adalah suatu interaksi yang dilakukan antar perorangan atau kelompok yang mewakili berbagai negara dalam upaya mencapai tujuan atau kepentingan bersama. Kesepakatan-kesepakatan yang terjalin antara satu negara dengan negara lain atau antar beberapa negara merupakan wujud dari kerjasama internasional. Untuk mengatasi berbagai tantangan hingga ancaman bagi kepentingan nasional suatu negara, memperluas dan memperkuat kerja sama internasional dan hubungan persahabatan yang tentunya saling menguntungkan dengan negara-negara mitra strategis tentu sangat penting. Hal ini juga menjadi latar belakang Indonesia dalam mempertimbangkan untuk menjalin kerjasama internasional dengan sesama negara-negara berkembang melalui kerangka Kerjasama Selatan-Selatan. Kerjasama internasional jelas menawarkan peluang yang baik untuk mengatasi berbagai tantangan dan isu-isu global.

c. Kerjasama Selatan-Selatan

Kerjasama Selatan-Selatan adalah sebuah kerangka kerjasama diantara negara-negara selatan yang bergerak di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan teknis. Kerjasama ini melibatkan dua atau lebih negara selatan dan dapat terjalin secara bilateral, regional, intraregional atau interregional (United Nations Office for South-South Cooperation, -). Negara-negara selatan sendiri merupakan sebutan untuk negara-negara berkembang yang menempati belahan bumi bagian selatan. Gills dan Gray dalam jurnalnya menggambarkan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai suatu konsep kerjasama yang saling menguntungkan dari

solidaritas di antara mereka yang memiliki latar belakang yang sama. Mereka menganggap bahwa pembangunan dapat dicapai oleh negara-negara berkembang melalui bantuan timbal balik satu sama lain tanpa harus bergantung dengan negara maju (Gray & Gills, 2016). Kerjasama Selatan-Selatan mengacu pada kerjasama terutama kerjasama di bidang teknis yang terjalin di antara negara-negara berkembang. Kerjasama ini menjadi wadah baik bagi negara, organisasi internasional, akademisi, masyarakat sipil hingga sektor swasta untuk berkolaborasi dan berbagi pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan di bidang-bidang tertentu seperti pengembangan pertanian, hak asasi manusia, urbanisasi, kesehatan, perubahan iklim dan lainnya (United Nations Office for South-South Cooperation, 2020). Kerjasama ini berawal dari masa-masa di tahun 1960-an dan 1970-an, dengan iklim sosial ekonomi global yang terjerat dengan politik Perang Dingin dimana negara-negara berkembang mulai mencari cara untuk memetakan arah perkembangan ekonomi mereka sendiri sebagai alternatif dari tatanan ekonomi dan politik yang ada.

Dalam *Grand Design Blueprint Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia* (Laporan Studi Kerjasama Selatan-Selatan (Draf Grand Design dan Cetak Biru), 2011), yang merupakan hasil dari pengembangan beberapa sumber terkait pelaksanaan Kerjasama Selatan-Selatan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2015, blueprint ASEAN yang juga merupakan hasil dari pengembangan pedoman pelaksanaan Kerjasama Selatan-Selatan oleh United Nations Office for South-South Cooperation, terdapat poin-poin prinsip kerangka Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia yang tidak jauh berbeda dengan pedoman pelaksanaan Kerjasama Selatan-Selatan oleh PBB yaitu:

1. Kepemilikan (Ownership)
2. Selaras dengan kebijakan pembangunan nasional
3. Kemitraan inklusif
4. Kesempatan yang sama (mutual opportunity)

5. Keunggulan komperatif
6. Prioritas negara berkembang (demand-driven)
7. Berkelanjutan
8. Fleksibilitas
9. Berbagi pengetahuan dan pengalaman
10. Akuntabilitas dan transparansi

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, Kerjasama Selatan-Selatan dilakukan atas dasar adanya solidaritas sesama negara berkembang untuk mencapai kemandirian melalui peningkatan kapasitas, pertukaran pengalaman, dan pengetahuan, maupun pemanfaatan sumber daya teknis untuk menemukan solusi atas masalah pembangunan. Kerjasama selatan-selatan juga dilaksanakan tanpa syarat, dimana kerjasama yang terjalin akan berjalan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh negara calon penerima bantuan yang kemudian dianalisis dan diidentifikasi oleh negara calon pemberi bantuan apakah sesuai dengan kapasitas dan strategi program bantuan yang mereka sediakan. Kerjasama umumnya juga terjalin antar negara berkembang dengan latar belakang dan tantangan yang sama sehingga kerjasama ini memiliki target yang jelas dan efektif. Kerjasama Selatan-Selatan mendukung negara-negara berkembang untuk menjalin kerjasama melalui berbagai kegiatan di bidang pembangunan, seperti pelatihan sumber daya manusia, pertukaran pengalaman dan ilmu pengetahuan baik di bidang perikanan, pangan dan pertanian, kesehatan, hingga industrialisasi. Sesuai dengan prinsipnya, kerjasama yang terjalin berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masing-masing negara harus dilakukan secara transparan, sehingga dapat saling menguntungkan baik bagi negara calon penerima maupun calon pemberi bantuan (Mursitama, 2014).

d. Kerjasama Pertanian

Kerjasama pertanian adalah suatu jenis kerjasama yang bergerak di bidang pertanian, baik pengolahan produk, pemasaran hasil, hingga penyediaan alat produksi pertanian (King & Ortmann, 2007). Sebagaimana negara-negara mulai gencar melakukan berbagai kerjasama di bidang pertanian sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, Indonesia sebagai negara agraris turut melihat peluang dalam kerjasama ini. Pilihan untuk menjalin kerjasama di bidang ini sudah cukup tepat mengingat bahwa kerjasama di bidang pertanian merupakan bentuk kerjasama yang paling banyak diminati oleh negara-negara berkembang dimana sebagian besar kehidupan masyarakatnya bertumpu pada sektor pertanian (Valentinov, 2007). Indonesia sebagai negara yang juga cukup mengandalkan sektor pertanian tentu harus mampu memberikan komitmen yang tinggi terhadap ketahanan dan swasembada pangan. Untuk mengembangkan, mempertahankan, atau bahkan menghadapi berbagai tantangan, pemerintah sebagai salah satu aktor pembangunan harus mampu membangun strategi dan kebijakan yang tepat. Kerjasama pertanian yang dilakukan Indonesia dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan, selain untuk mendapatkan keuntungan melalui pertukaran pengalaman dan pengetahuan di bidang pertanian, kerjasama pertanian ini juga merupakan salah satu strategi diplomasi ekonomi Indonesia dengan negara-negara berkembang terutama negara-negara bagian selatan global. Dalam penelitian ini peneliti akan melihat bagaimana bentuk strategi diplomasi ekonomi Indonesia di bidang pertanian dalam Kerjasama Selatan-Selatan.

e. Kawasan Asia Pasifik

Tidak mudah untuk mendefinisikan Kawasan Asia Pasifik karena tidak adanya definisi yang jelas sebagaimana pengelompokan kawasan tersebut akan berbeda-beda menurut konteksnya. Namun secara umum dapat diterima bahwa Kawasan Asia Pasifik terdiri dari negara-negara yang terletak di wilayah sekitar Samudra Pasifik Barat. Secara umum, Kawasan ini terdiri dari

negara-negara di Asia Timur dan Selatan, Asia Tenggara, dan laut pasifik (oceania) (Zukrowska, 2014). Dalam Statistical Yearbook for Asia and the Pacific 2016, Kawasan Asia Pasifik terdiri dari 58 anggota regional dan anggota asosiasi dari Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik yang dikategorikan berdasarkan subkawasan geografis sebagai berikut:

Tabel 1.2 Kawasan Asia Pasifik

Region	Countries
<i>East and North-East Asia (ENEA)</i>	Cina, Republik Demokratik Rakyat Korea (DPR Korea), Hong Kong, Jepang, Macao, Mongolia, Republik Korea, Timor Leste.
<i>South-East Asia</i>	Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam.
<i>South and South-West Asia (SSWA)</i>	Afganistan, Bangladesh, Bhutan, India, Iran, Maladewa, Nepal, Pakistan, Srilanka, Turki.
<i>North and Central Asia (NCA)</i>	Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Federasi Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan.
<i>Pacific</i>	Samoa Amerika, Australia, Kepulauan Cook, Fiji, Polinesia Perancis, Guam, Kiribati, Pulau Marshall, Federasi Mikronesia, Nauru, Kaledonia Baru, Selandia Baru, Niue, Kepulauan Mariana Utara, Palau, Papua Nugini, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

Sumber: UNESCAP: Statistical Yearbook for Asia and the Pacific 2016

Dengan banyaknya negara-negara di Kawasan Asia Pasifik, dalam penelitian ini, penulis hanya akan memilih beberapa negara saja yang akan menjadi objek penelitian. Mengingat salah satu prioritas kebijakan pemerintah Indonesia adalah untuk membangun wilayah perbatasan dengan sektor pertanian sebagai fokus utama pembangunan yang harapannya wilayah-wilayah tersebut akan menjadi pintu gerbang ekspor Indonesia terutama untuk produk pertanian ke negara-negara tetangga, penulis memilih lima negara di dalam Kawasan Asia Pasifik yang berbatasan langsung dengan Indonesia yaitu Republik Palau, Fiji, Papua Nugini, Kamboja dan Timor Leste sebagai objek dari penelitian ini.

1.9.3 Fokus Penelitian

Tabel 1.3 Fokus Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator	Deskripsi
Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia Di Bidang Pertanian Melalui Kerangka Kerjasama Selatan- Selatan Di Kawasan Asia Pasifik	<i>Normative principles oleh UNOSSC Framework of Operational Guidelines on United Nations Support to South- South Cooperation</i>	<i>Partnership among equality</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Kerjasama dengan sesama negara berkembang ● Negara pemberi dan penerima memiliki kesamaan latar belakang ● Memiliki masalah atau tantangan yang sama
		<i>Mutual benefit partnership</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Kerjasama terjalin atas dasar keinginan untuk mencapai kemandirian bersama ● Tercapainya keuntungan bersama ● Pemberian program bantuan sesuai dengan keunggulan dan pengalaman

		<i>Evidence and result base initiatives</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Adanya pertukaran pengalaman dan pengetahuan ● Kerjasama berdasarkan permintaan ● Program bantuan diberikan berdasarkan kemampuan
		<i>Development Effectiveness</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Adanya kejelasan target negara calon penerima bantuan ● Kerjasama berkelanjutan

Sumber: hasil konstruksi penulis berdasarkan pedoman pelaksanaan Kerjasama Selatan- Selatan

1.9.4 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Indonesia sebagai aktor utama diplomasi dan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai kerangka yang mewadahi kerjasama dan Asia Pasifik sebagai Kawasan yang akan diteliti.

1.9.5 Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dimana data akan disampaikan dalam bentuk kata, kalimat, maupun gambar. Penelitian dengan data kualitatif sangat sering digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial dan politik karena penelitian yang bersifat kualitatif dapat digunakan untuk meneliti permasalahan secara mendalam seperti fenomena-fenomena sosial hingga kajian organisasi.

b. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dimana data yang dikumpulkan oleh peneliti diperoleh dari sumber-sumber atau bukti yang sudah ada baik berupa buku, artikel, jurnal, media tertulis, dokumen resmi, arsip yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan secara langsung, hingga laporan tahunan dari organisasi atau kementerian terkait yang berkaitan dengan objek penelitian terutama mengenai Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia di bidang pertanian yang terkait dengan diplomasi ekonomi Indonesia yang kemudian akan peneliti kumpulkan untuk membantu menarik kesimpulan dasar dan menjawab permasalahan dari penelitian ini.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dimana data-data dikumpulkan melalui buku-buku, literatur-literatur, catatan, penelitian terdahulu, laporan-laporan hingga sumber-sumber lain baik yang tercetak maupun elektronik yang berkaitan dengan topik penelitian yang diteliti. Data-data yang telah terkumpul kemudian digabungkan, dipelajari, dan diolah oleh peneliti untuk menjawab permasalahan yang menjadi topik penelitian.

1.9.7 Teknik Keabsahan Data

Dalam melakukan pemeriksaan keabsahan data, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi data dimana teknik pemeriksaan data dilakukan dengan memanfaatkan data atau informasi lain sebagai keperluan pengecekan dan pembanding terhadap data yang digunakan. Menurut Norman K Denzin dan Yvonna S. Lincoln (Denzin & Lincoln, 2005), triangulasi data merupakan teknik pengecekan data dengan cara mengumpulkan berbagai data dan informasi dari berbagai sumber dan perspektif yang berbeda melalui berbagai cara dan waktu yang berbeda. Denzin dan Lincoln juga membagi teknik triangulasi menjadi empat hal yaitu:

1. Triangulasi Metode

Untuk memperoleh keabsahan informasi, teknik ini dilakukan dengan membandingkan data dan informasi yang diperoleh dengan cara yang berbeda.

2. Triangulasi Antar-peneliti

Teknik ini dilakukan oleh lebih dari satu peneliti dalam melakukan pengumpulan dan analisis data. Perbedaan cara dan perspektif dalam melakukan penelitian akan memperkuat hasil analisis dan informasi yang didapatkan.

3. Triangulasi Sumber

Teknik ini dilakukan dengan menggali kebenaran data dan informasi melalui berbagai metode dan sumber yang berbeda.

4. Triangulasi Teori

Data-data yang digunakan dalam penelitian akan diuji dengan cara dibandingkan dengan dua atau lebih teori yang relevan. Dalam menggunakan teknik ini, diperlukan rancangan penelitian, pengumpulan data, serta analisis data yang lengkap. Dalam penelitian ini sendiri, digunakan teknik triangulasi metode dan sumber. Hal ini dikarenakan penulis melakukan uji keabsahan

data dengan cara mengumpulkan data-data dan informasi dari berbagai sumber yang berbeda untuk kemudian dibandingkan dan diuji kebenarannya.

1.9.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah teknik yang dilakukan peneliti dalam mengolah data-data yang telah dikumpulkan melalui proses pengumpulan data yang telah terverifikasi. Dalam bukunya, Miles dan Hubberman menjelaskan bahwa teknik analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga proses yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1992).

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bagian dari proses analisis yang dimulai dengan melakukan penyederhanaan data yang dikumpulkan melalui seleksi keabsahan data mentah termasuk membuat ringkasan-ringkasan, mengkode, menggolongkan data, hingga membuang yang tidak perlu untuk kemudian diarahkan kepada penarikan-penarikan kesimpulan dan diverifikasi. Dalam penelitian ini penulis perlu memilih dan menyeleksi data-data mengenai kerjasama selatan-selatan yang bergerak di bidang pertanian agar dapat sesuai dengan tema penelitian yang diangkat.

2. Penyajian Data

Setelah melalui tahap reduksi data, maka tahap selanjutnya adalah penyajian data. Proses penyajian data ini merupakan proses pengumpulan informasi dan data-data yang kemudian disusun dalam format tertentu untuk kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, format-format penyajian data yang umumnya digunakan adalah berupa narasi, gambar, skema, tabel, maupun infografis. Penyajian data harus disesuaikan dengan apa yang ingin disampaikan dengan tujuan agar pembaca dapat lebih mudah dalam memahami pembahasan penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir dalam penelitian ini adalah proses verifikasi akhir dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan di awal yang bersifat sementara dan dapat berubah akan diverifikasi kembali di tahap ini dan diuji validitas datanya yang disebut sebagai verifikasi data. Kesimpulan yang ditarik dapat dikatakan kredibel hanya jika kesimpulan tersebut didukung oleh data-data atau bukti pendukung yang valid. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan bisa saja dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal penelitian. Namun, tidak menutup kemungkinan kesimpulan tersebut tidak menjawab rumusan masalah secara keseluruhan karena masalah penelitian dalam penelitian kualitatif bersifat terbuka dan dapat terus berkembang. Dalam penelitian ini, kesimpulan yang akan ditarik adalah mengenai strategi diplomasi ekonomi Indonesia di bidang pertanian yang dilakukan melalui kerangka kerjasama selatan-selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Bayne, N., & Woolcock, S. (2017). *The New Economic Diplomacy, Decision-making and negotiation in international economic relations Fourth Edition*. London and New York: Routledge.
- Berridge, G. R., & James, A. (2003). *A Dictionary of Diplomacy Second Edition*. New York: Palgrave Macmillan.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2005). *The Sage Handbook Of Qualitative Research*. California: Sage Publications Inc.
- Kementerian Pertanian. (2017). *Statistik Pertanian 2017*. Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Keohane, R. O. (1989). Neoliberal Institutionalism. In R. O. Keohane, *International Institution and State Power* (p. 2). Boulder: Westview Press.
- Taylor, M. (1987). *The Possibility of Cooperation (Studies in Rationality and Social Change)*. New York: Cambridge University Press.
- Woolcock, S. (2017). Factors Shaping Economic Diplomacy. In N. Bayne, & S. Woolcock, *The New Economic Diplomacy* (p. 38). New York: Routledge.

Sumber Jurnal dan Kajian Ilmiah:

- Abdurachman, B., & Prakoso, B. M. (2017). Peran Indonesia dalam Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular. *Jurnal Transborder* | Vol.1 No.1, 7.
- Aid For Development Effectiveness Secretariat Japan International Cooperation Agency. (2010). *Policy Direction on Indonesia's South-South Cooperation . Main Report and Policy Paper*, 125.
- Axelrod, R., & Keohane, R. O. (1985). Achieving Cooperation under Anarchy: Strategies and Institutions. *World Politics*, 226-254.
- Axelrod, R., & Keohane, R. (1985). Achieving Cooperation Under Anarchy. *World Politics* , 226-254.
- Chaturvedi, T., & Chakrabarti, M. (2019). *South-South Cooperation - A Theoretical and Institutional Framework*. New York: United Nations Office for South-South Cooperation and the United Nations Development Programme.
- (CEACoS), C. F. (2010). *Studi Arah Kebijakan Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan*. Policy Paper Center for East Asian Cooperation Studies (CEACoS), 192.
- Franceschet, A. (2001). Sovereignty and freedom: Immanuel Kant's liberal internationalist 'legacy'. *Review of International Studies*, 211.

- Gray, K., & Gills, B. K. (2016). South–South cooperation and the rise of the Global South. *Third World Quarterly* Volume 37, 557-574.
- Herbert, A. L. (1996). Cooperation in International Relations: A Comparison of Keohane, Haas and Franck. *Berkeley Journal of International Law*, 226.
- Hermanto. (2018). Arah Kebijakan Kerjasama Pertanian Indonesia di Kawasan Asia Pasifik. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 36 No. 1, 77.
- Kakonge, J. O. (2014). The Evolution of South-South Cooperation: A Personal Reflection. *Global Policy Essay*, 2.
- Keohane, R. O., & Martin, L. L. (1995). The Promise of Institutional Theory. *International Security*, 42-43.
- King, R. P., & Ortmann, G. F. (2007). *Agricultural Cooperatives I: History, Theory and Problems*. Agrekon, 40.
- Milner, H. (2011). International Theories of Cooperation Among Nations: Strengths and Weaknesses. *World Politics*, 466-496.
- Mursitama, T. (2014). Seeking a New Format in South-South Cooperation and The Benefits for Indonesia. *Study On Policy Implementation And Funding Partnership Strategy Of South-South And Triangular Cooperation*, 15.
- Pham, J. P. (2015). What Is in the National Interest? Hans Morgenthau's Realist Vision and American Foreign Policy. *The Journal of the National Committee on American Foreign Policy*, 188.
- Santikajaya, A. (2016, Vol 71 (4)). Walking the middle path: The characteristics of Indonesia's rise. *International Journal*, 563-586.
- Suryana, M. (2010). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sumber Internet:
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2010, Februari). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014. Retrieved from Kementerian PPN/Bappenas: www.bappenas.go.id
- Kakonge, J. O. (2014, July 16). global policy. Retrieved from globalpolicyjournal.com: <https://www.globalpolicyjournal.com/articles/development-inequality-and-poverty/evolution-south-south-cooperation-personal-reflection>
- KBRI di Phnom Penh Kamboja. (2020, June 25). Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh, Kerajaan Kamboja. Retrieved from kemlu.go.id/phnompenh/id: <https://kemlu.go.id/phnompenh/id/news/7338/semptat-terhenti-akibat-covid-19-salak-indonesia-kembali-eksis-di-kamboja>

- Kementerian Pertanian; CNN Indonesia. (2020, September 18). Ekonomi | Grafik Kinerja Sektor Pertanian Meningkatkan Signifikan di 2020. Retrieved from CNN Indonesia: cnnindonesia.com
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2019, Mei). Publikasi. Retrieved from Kementerian Pertanian Republik Indonesia: pertanian.go.id
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Qualitative data analysis*. Jakarta, Jakarta, Indonesia. Commodities and Trade Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2002). Publications. Retrieved from <http://www.fao.org/>: <http://www.fao.org/3/a-y3997e.pdf>
- Roskin, M. G. (1994, May 20). Military. Retrieved from globalsecurity.org: https://www.globalsecurity.org/military/library/report/1994/ssi_roskin
- Team, N. C. (2015, - -). National Coordination Team on South-South Cooperation and Triangular of Indonesia. Retrieved from ssc.indonesia.org: http://ssc.indonesia.org/ksst/indexca35.html?page_id=1208
- Tim Penyusun Kajian Mandiri Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2015). *Reorientasi Kerja sama Selatan - Selatan dan Triangular bagi Kepentingan Nasional*. Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2019, march 20). Department of Economic and Social Affairs. Retrieved from United Nations: un.org
- United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. *Statistical Yearbook for Asia and the Pacific 2016*. Retrieved from United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: unescap.org
- United Nations Office for South-South Cooperation. (-, - -). *About South-South and Triangular Cooperation*. Retrieved from United Nations Office for South-South Cooperation: unsouthsouth.org
- United Nations Office for South-South Cooperation. (2020). *What is South-South Cooperation*. Retrieved from United Nations Office for South-South Cooperation: unsouth-south.org
- United Nations Office for South-South Cooperation. (2016, March 14). *Policy Documents*. Retrieved from United Nations Office for South-South Cooperation: unsouthsouth.org
- Valentinov, V. (2007). Why are cooperatives important in agriculture? An organizational economics perspective. *Journal of Institutional Economics* , 7.